

## Pendidikan Sebagai Landasan Kesejahteraan Bangsa

□ **Suke Silverius, Ph.D.**

(Balitbang Dikbud)

**K**esejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa adalah tujuan nasional Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tampak pada rumusan tersebut bahwa ada keterkaitan yang sangat erat antara kesejahteraan umum dengan kecerdasan kehidupan bangsa. Keterkaitan ini dapat dilihat pada bunyi pasal 27 ayat 2 dan 31 ayat 1 UUD 1945. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap Warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Sementara pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa "Tiap-tiap Warganegara berhak mendapat pengajaran."

Jika kedua bunyi pasal dan ayat ini dipadukan dalam urutan sebaliknya maka diperoleh pernyataan bahwa tiap warganegara berhak mendapat pendidikan yang secukupnya agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu untuk memperoleh pemenuhan haknya yakni mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apabila hal ini terwujud, maka seluruh bangsa yang merupakan himpunan semua "tiap-tiap warganegara" itu pun merupakan bangsa yang cerdas dan makmur. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang bermutu merupakan prasyarat utama kemajuan suatu bangsa.

Sejarah perkembangan bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu negara dalam berbagai bidang ipolek-sosbudhankam tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alam yang dimilikinya melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusianya yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alamnya yang

unggul itu. Hal ini diungkapkan pula dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ... digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Penggunaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu hanya dapat dimungkinkan apabila pengolahan dan pengelolaannya ditangani oleh tenaga-tenaga terampil dan profesional, yang memiliki keunggulan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Mutu atau kualitas tenaga kerja dan peluang pada sektor-sektor pembangunan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat inilah yang mendasari struktur ketenagakerjaan di Indonesia.

### Ketenagakerjaan di Indonesia

Berbicara mengenai ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari berbicara mengenai sistem pendidikan yang membina dan meningkatkan kualitas ketenagakerjaan. Peranan pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja terampil dan produktif untuk memenuhi permintaan ekonomi industri sangat diprasyaratkan oleh tingginya mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan. Data empiris dari berbagai penelitian memperlihatkan bahwa produktivitas tenaga kerja terdidik lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja tidak/kurang terdidik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tenaga kerja semakin tinggi pula kesiapannya untuk memanfaatkan kemampuannya sampai kepada tingkat kinerja yang tinggi pula. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tenaga kerja semakin tinggi pula produktivitas kerjanya.

Kebutuhan akan tenaga kerja terdidik ini lebih kuat lagi dituntut dalam dan oleh suatu

masyarakat industri. Hal ini terjadi pula di Indonesia. Modernisasi masyarakat Indonesia yang ditandai oleh dominasi sektor industri pada hampir semua kegiatan ekonomi nasional memperlihatkan telah berlangsungnya peralihan dari dominasi sektor ekonomi pertanian. Perubahan

termaksud dapat dipantau dari semakin berkurangnya peranan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sementara semakin meningkat pula peranan sektor industri, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1**  
**Kontribusi Sektorial terhadap PDB**  
**Tahun 1980 - 1994**

(dalam %)

SEKTOR-SEKTOR	1980	1985	1990	1994
1. Pertanian	23,10	22,68	19,58	17,44
2. Pertambangan	26,18	19,18	15,19	8,31
3. Industri Pengolahan	12,43	15,79	19,30	23,91
4. Listrik, Gas, Air	0,26	0,42	0,63	1,04
5. Bangunan	5,44	4,30	5,82	7,40
6. Perdagangan	13,71	14,57	16,15	16,55
7. Pengangkutan	4,42	5,27	5,54	7,14
8. Lembaga Keuangan	4,92	6,44	6,75	8,89
9. Jasa-jasa	9,72	11,33	11,05	9,29
<b>J u m l a h</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Sensus Penduduk 1980 dan 1990, Supas 1985, dan Sakernas 1994.*

Pencanangan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar 6 Tahun oleh Presiden pada Hardiknas 2 Mei 1984 dan pelaksanaannya yang dimulai pada tahun ajaran 1984/1985 (minggu ketiga Juli 1984) merupakan salah satu faktor pendorong percepatan perubahan struktur ekonomi dan ketenagakerjaan, karena program tersebut berhasil meningkatkan proporsi angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Pergerakan struktur ekonomi ke arah struktur yang lebih industrial diakibatkan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem

pendidikan dituntut untuk membentuk manusia-manusia Indonesia yang memiliki integritas kepribadian yang tangguh sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara, dan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan.

Kedua tuntutan ini berakar dari konsep "*Link and Match*", yakni suatu pendekatan atau strategi peningkatan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja pada semua sektor pembangunan. *Link* ialah keterkaitan antara pendidikan dengan berbagai sektor pembangunan. *Match* ialah keselarasan antara hasil pendidikan dengan sektor-sektor pembangunan.

Dengan demikian pendidikan harus di"kait"kan dengan kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja sehingga hasilnya menjadi "sepadan" dengan kebutuhan tersebut. Apabila hal ini terwujud maka akan terjadi keseimbangan antara persediaan tenaga kerja yang dihasilkan pendidikan dengan kesempatan kerja dalam sistem ekonomi.

Keseimbangan ini harus senantiasa di-analisis agar dapat diketahui perkembangan tingkat kesepadanan antara persiapan tenaga kerja yang dihasilkan pendidikan secara makro dengan kebutuhan lapangan kerja menurut jenjang pendidikan. Upaya peningkatan penyesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor ekonomi akan berdampak semakin meningkatnya kemampuan tenaga kerja profesional para lulusan berbagai jenis dan jenjang pendidikan.

Profesionalisme tenaga kerja dapat dibedakan atas tiga jenjang yakni tenaga terampil, tenaga teknisi, dan tenaga ahli. Profesionalisme tenaga kerja ini akan semakin tajam dan cermat apabila diterapkan kebijakan *Link and Match* dalam pendidikannya. Dapat disimpulkan bahwa konsep *Link and Match* diwujudkan dalam upaya peningkatan kualitas ketenagakerjaan.

Ketenagakerjaan merupakan suatu konsep yang kompleks. Konsep ketenagakerjaan mencakup berbagai faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi struktur ketenagakerjaan. Salah satu faktor yang memberi landasan bagi bangunan struktur ketenagakerjaan ialah profesionalisme tenaga kerja. Dalam kaitan ini maka struktur ketenagakerjaan di Indonesia merupakan salah satu titik tolak upaya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Perkembangan struktur ketenagakerjaan di Indonesia ditandai oleh semakin meningkatnya peluang kerja pada sektor- sektor industri yang mengakibatkan semakin berkurangnya kesempatan kerja pada sektor pertanian. Perubahan struktur dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi industri berdampak pada tuntutan kualitas

sumber daya manusia yakni tenaga kerja yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi dibanding dengan kualitas sumber tenaga dalam kegiatan ekonomi pada sektor pertanian.

Situasi yang diperkirakan akan berkembang sebagai akibat perubahan struktur ketenagakerjaan ialah berkembangnya pekerja otak yakni tenaga kerja yang lebih mengandalkan pendayagunaan kemampuan intelektualnya. Tenaga kerja otak diperlukan untuk jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, keahlian, dan kreativitas yang didukung oleh kemampuan profesional. Situasi ini didukung oleh kemampuan belajar mandiri sehingga dapat lebih mampu berkreasi dan berinovasi untuk dapat bekerja secara mandiri. Kemandirian ini akan menjadi landasan terciptanya kemandirian bangsa.

Kemandirian (*self-reliance*) suatu bangsa sangat diperlukan lebih- lebih dalam era globalisasi dewasa ini yang menuntut semua bangsa untuk saling bekerja sama dalam kemitraan seimbang demi pencapaian pembangunan di negaranya masing-masing. Dalam wujud kerja sama tersebut tidaklah terjadi saling ketergantungan yang sedemikian jauh sehingga melenyapkan kemandirian. Sebaliknya, mempertahankan kemandirian tidaklah berarti mengisolasi diri secara menyeluruh terhadap pihak lain, karena situasi ini akan menimbulkan chauvinisme, suatu paham nasionalisme yang sempit.

Berlandaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka, Indonesia membuka diri terhadap segala perkembangan dunia untuk mengejar keunggulan (*excellence*) tanpa mempertaruhkan kepribadian Pancasila, sehingga terwujud pula daya saing yang sehat terhadap perkembangan modernisasi semesta. Oleh karena itu tak dapat dipungkiri bahwa dalam kerja sama itu terliput pula jiwa dan semangat kemandirian yang memancarkan daya saing yang cukup kuat terhadap bangsa lain. Daya saing suatu bangsa dipengaruhi

antara lain oleh kemampuan bangsa itu dalam memelihara kemandiriannya tanpa mengabaikan sosialisme mundial. Upaya perwujudan dan pemeliharaan kemandirian itu dilakukan melalui pendidikan dan kebudayaan.

Disamping keterampilan teknis, tenaga kerja pun dituntut memiliki kematangan mental, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan kerjanya. Kualitas tenaga kerja termaksud dicerminkan oleh kemampuannya mengolah dan mendayagunakan informasi, memiliki wawasan yang luas mengenai jenis-jenis keterampilan, mampu menerapkan keahliannya secara meluas, dan dapat mendiagnosa permasalahan. Hal ini menunjukkan situasi berkembangnya komplek-

sitas keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Situasi-situasi tersebut di atas menimbulkan ketimpangan antara struktur angkatan kerja (*supply*) dengan struktur ekonomi (*demand*) yang pada akhirnya menimbulkan pengangguran struktural. Banyak tenaga kerja tidak dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Situasi ini dapat dilihat dari data penduduk menurut pendidikan tertinggi yang dimilikinya dan data penduduk menurut jenis kegiatan yang dijalankannya. Data dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada Biro Pusat Statistik mengenai Statistik Kesejahteraan Rakyat 1995 memberikan informasi struktur kependidikan sebagai berikut:

#### a. Pendidikan

**Tabel 2**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah
A1	3,37	20,98	26,87	16,06	2,03	15,42	9,35	0,71	1,85	3,36	100,00
A2	9,65	22,49	28,68	14,90	1,70	11,72	7,29	0,59	1,34	1,63	100,00
A1+A2	6,56	21,75	27,79	15,47	1,86	13,54	8,30	0,65	1,59	2,48	100,00
B1	9,96	36,03	35,11	18,94	1,39	3,91	3,67	0,27	0,29	0,42	100,00
B2	21,08	35,11	31,28	6,49	0,97	2,28	2,31	0,17	0,14	0,18	100,00
B1+B2	15,59	35,57	33,17	7,70	1,18	3,09	2,98	0,22	0,21	0,30	100,00
C1	7,58	30,60	32,14	11,51	1,62	8,06	5,72	0,43	0,85	1,48	100,00
C2	16,94	30,54	30,34	9,54	1,23	5,70	4,11	0,32	0,58	0,70	100,00

Sumber: Susenas 1996.

#### Keterangan:

A = Perkotaan

B = Pedesaan

A1 = Laki-laki

B1 = Laki-laki

A2 = Perempuan

B2 = Perempuan

A1+2 = L + P

B1+2 = L + P

C = Perkotaan dan Pedesaan

C1 = Laki-laki

C2 = Perempuan

C1+2 = Laki-laki + perempuan

1 = Tidak pernah sekolah

6 = SMTA Umum

2 = Tidak tamat SD

7 = SMTA Kejuruan

3	= SD	8	= Diploma I/II
4	= SMTP Umum	9	= Akademi/Diploma III
5	= SMTP Kejuruan	10	= Universitas/Diploma IV

Penduduk yang belum menamatkan SD sebanyak 30,57% sedangkan yang berhasil menamatkan SD sebanyak 31,22%. Pada tingkat SLTP, penduduk yang menamatkan SMTP Umum sebanyak 10,51% dan yang menamatkan SMTP Kejuruan sebanyak 1,43%. Penduduk yang berhasil menamatkan SMTA Umum sebanyak 6,87% sementara yang menamatkan SMTA Kejuruan sebanyak 4,90%. Lulusan Diploma I dan Diploma II sebanyak 0,37%, Akademi/Diploma III sebanyak 0,71%, dan Universitas /Diploma IV sebanyak 1,09%. Sedangkan penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 12,33%.

#### *b. Angkatan Kerja*

Penggolongan penduduk usia kerja adalah 10 tahun ke atas dan meliputi angkatan kerja apabila telah bekerja atau mencari pekerjaan dan bukan angkatan kerja apabila masih bersekolah,

mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Perkembangan keadaan angkatan kerja sejak tahun 1980 sampai dengan 1994 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 memperlihatkan adanya gejala positif dengan semakin meningkatnya proporsi angkatan kerja yang berpendidikan lebih tinggi sementara sebaliknya persentase angkatan kerja berpendidikan rendah semakin menurun. Pergeseran seperti inilah yang dikehendaki, oleh karena itu perlu digalakkan.

Menghadapi pergeseran-pergeseran penting dalam ketenagakerjaan tersebut di atas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dituntut menerapkan berbagai kebijakan pembangunan pendidikan, baik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maupun dalam menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industrialisasi masyarakat.

**Tabel 3**  
**Struktur Angkatan Kerja Menurut Pendidikan**  
**Tahun 1980 - 1994**

Pendidikan Tinggi		Persentase Angkatan Kerja (dalam %)						
		1980	1982	1985	1986	1987	1990	1994
1.	Tidak/Belum sekolah	29,60	26,46	21,71	18,48	16,94	17,47	10,97
2.	Tidak Tamat SD	37,64	32,73	34,40	29,93	28,15	28,15	23,01
3.	Tamat SD	21,23	27,18	27,60	33,26	34,43	31,52	36,72
4.	Tamat SLTP Umum	3,97	4,69	5,64	6,82	7,62	8,03	10,21
5.	Tamat SLTP Kejuruan	1,14	1,47	1,40	1,32	1,32	0,94	1,43
6.	Tamat SLTA Umum	2,40	2,70	3,51	4,37	4,81	6,08	6,35
7.	Tamat SLTA Kejuruan	3,21	3,90	4,46	4,46	4,94	5,51	6,37
8.	Tamat PT. Diploma	0,43	0,51	0,75	4,72	5,19	1,21	1,58
9.	Tamat Universitas	0,38	0,35	0,52	0,48	0,77	1,18	1,35
Presentase		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Sumber: Sensus Penduduk 1980 dan 1990, Supas 1985, dan Sakernas 1982, 1986, 1987, dan 1994.*

## Kebijakan Pembangunan Pendidikan

Jenis pendidikan yang langsung berkaitan dengan proses industrialisasi adalah pendidikan kejuruan. Tidaklah mengherankan bahwa dalam upaya penerapan kebijakan *Link and Match* penekanan lebih diberikan pada pendidikan kejuruan dan teknologi, baik yang diselenggarakan dalam sistem pendidikan sekolah maupun dalam sistem pendidikan luar sekolah.

Untuk mengoptimalkan keberhasilan pendidikan kejuruan maka pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem pendidikan kejuruan dengan sistem ganda (Pendidikan Sistem Ganda atau disingkat PSG). Sistem ini memiliki kemiripan dengan sistem pendidikan ganda yang dipakai di Jerman. Melalui sistem ini pengembangan tenaga profesional baik tenaga terampil, teknisi, maupun ahli, menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan dunia industri. Dengan demikian, pembiayaan yang selama ini menjadi beban utama pemerintah akan semakin ringan karena dibantu oleh dunia usaha/industri.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, sistem pendidikan diselenggarakan secara semesta yakni diperuntukkan bagi semua warganegara di seantero nusantara, sebagai jawaban atas tuntutan fasal 31 ayat 1 UUD 1945. Sistem pendidikan diselenggarakan pula secara menyeluruh, yakni meliputi semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Dan pada akhirnya sistem pendidikan diselenggarakan pula secara terpadu sehingga terdapat saling keterkaitan antara pendidikan dengan upaya pembangunan nasional.

Rangkaian kebijakan tersebut di atas berkaitan dengan upaya melaksanakan pembangunan pendidikan nasional Repelita VI sesuai GBHN 1993, yang meliputi pembinaan di berbagai bidang pendidikan, antara lain efisiensi, efektivitas, dan produktivitas; kurikulum; sarana dan prasarana; guru; buku; dan program Wajar Dikdas 9 Tahun.

Efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan perlu ditingkatkan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk peningkatan kemampuan dan penyempurnaan perencanaan terpadu, administrasi pelayanan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengorganisasian, dan ketatausahaan. Peningkatan ini perlu ditunjang oleh kurikulum yang tertata baik.

Karena batasan kurikulum sangat beragam, maka yang dimaksud dengan kurikulum di sini ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Kurikulum di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan perlu dikembangkan dan diperkaya secara berkala sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan pembangunan sejalan dengan perkembangan zaman. Justru karena itu maka kurikulum diperkaya dengan muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan daerah setempat. Pencapaian kurikulum dapat berhasil apabila ditunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan, jumlah dan kualitas guru, serta tersedianya buku-buku pelajaran maupun buku perpustakaan.

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik jumlah maupun mutunya di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan perlu ditingkatkan agar membantu pembinaan tenaga kerja yang terampil dan profesional. Sarana belajar sebagai alat bantu bagi guru dalam kegiatan belajar-mengajar untuk meningkatkan efektivitas mengajar merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan belajar dan peningkatan prestasi belajar siswa. Meningkat tidaknya mutu pendidikan dipersyaratkan pula oleh tersedia tidaknya dan dimanfaatkan tidaknya sarana belajar tersebut. Maka, sangat disayangkan apabila alat peraga dan alat praktek yang telah diberikan ke sekolah-sekolah ternyata tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya perlu ditingkatkan antara lain melalui

pendidikan, penataran, dan penyegaran yang dilakukan secara terus menerus. Kesejahterannya pun perlu ditingkatkan antara lain dengan pembinaan karier. Pemberian insentif dan penghargaan bagi guru yang berprestasi dan berdedikasi perlu dikembangkan untuk memacu prestasi. Semua upaya ini berguna untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan serta citra, wibawa, harkat dan martabat guru. Instansi-instansi yang menangani sistem pengadaan, pemanfaatan, dan pembinaan tenaga-tenaga kependidikan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus memiliki persepsi yang sama serta kebijakan yang terkoordinasi demi mencapai hasil yang semaksimal mungkin.

Perbukuan memegang peranan sangat penting dalam usaha meningkatkan kemampuan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Oleh karena itu penulisan dan penerjemahan, serta penggandaan buku pelajaran, buku bacaan, serta buku ilmiah lainnya yang bermutu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas cakrawala berpikir serta menumbuhkan budaya baca dan belajar peserta didik. Disamping buku pelajaran, diperlukan pula buku-buku kurikulum dan buku-buku perpustakaan. Namun, perlu ditegaskan pula bahwa betapapun lengkapnya perbukuan di suatu sekolah, semuanya itu tidaklah berarti sedikitpun apabila tidak didayagunakan dalam kegiatan belajar-mengajar.

Semua upaya yang diambil dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan tersebut di atas dapat berlangsung dengan baik dan berhasil apabila ditunjang oleh keadaan peserta didik, termasuk gizinya. Hal perbaikan gizi anak sekolah mendapat perhatian khusus pemerintah sebagaimana tampak dalam Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) bagi anak SD dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) di desa tertinggal di luar Jawa dan Bali. Program ini yang dimulai pada tahun 1996/1997 sangat terkait dengan program perbaikan gizi anak

sekolah, pendidikan dasar, diversifikasi pangan, dan peningkatan ekonomi desa tertinggal.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas menunjang pelaksanaan pembinaan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sampai ke Sekolah Menengah dan Pendidikan Tinggi serta Pendidikan Luar Sekolah.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) merupakan kebijakan ke arah pembinaan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Wajar Dikdas 9 Tahun di Indonesia berbeda dengan compulsory education di berbagai negara maju lain yang bercirikan antara lain adanya unsur paksaan untuk bersekolah dan sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Wajar Dikdas 9 Tahun di Indonesia merupakan "*basic universal education*" yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. Dengan demikian tidak ada paksaan tetapi bersifat persuasif, tanpa sanksi hukum tetapi berlandaskan moral orangtua dan peserta didik untuk mengikuti pendidikan dasar.

Melalui program Wajar Dikdas 9 Tahun terjadi peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun yang diharapkan akan berdampak tercapainya kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Hasil optimal yang diharapkan dari pelaksanaan program Wajar Dikdas 9 Tahun ini ialah terciptanya tenaga profesional sebagai tenaga-tenaga terampil. Disamping itu, melalui program ini pula dapat dihasilkan tenaga teknisi apabila lulusannya melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan. Berbagai kebijakan dapat diambil terhadap pembinaan Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan. Kualitas SMU (Sekolah Menengah Umum) ditingkatkan, antara lain dengan pengembangan kurikulum baru yang menerapkan sistem catur wulan, penjurusan di tingkat III, dan

berisi komponen kurikulum muatan lokal. Demikian juga dengan pengadaan dan peningkatan mutu tenaga pendidikan, perbaikan metode belajar mengajar, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan. Melalui pendidikan pada tingkat pendidikan menengah umum dan kejuruan dapat diperoleh tenaga-tenaga profesional sebagai teknisi, khususnya teknisi tingkat menengah.

Kebijakan pembinaan Pendidikan Tinggi dapat berupa penyeimbangan dan penyerasian jumlah dan jenis program studi yang diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan perkembangan iptek, tuntutan kebutuhan pembangunan serta perkembangan zaman. Melalui pembinaan pada pendidikan tinggi dapat diperoleh tenaga profesional yang ahli.

Terhadap Pendidikan Luar Sekolah dilaksanakan program pembinaan yang diarahkan kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan berwiraswasta sebagai bekal kemampuan bekerja dan berusaha. Di samping itu diupayakan agar pendidikan keluarga dapat meningkatkan fungsinya untuk memberikan landasan yang kuat bagi pembentukan kepribadian, penanaman nilai-nilai agama, nilai budaya, nilai moral, dan budi pekerti luhur. Pendidikan luar sekolah turut menunjang upaya program Wajib Dikdas 9 Tahun untuk menghasilkan tenaga profesional pada jenjang teknisi, baik teknisi dasar maupun teknisi menengah.

Semua kebijakan ini akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar apabila didukung oleh keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peningkatan peran-serta masyarakat termasuk dunia usaha perlu senantiasa diupayakan antara lain melalui pengembangan mekanisme kerja sama saling menguntungkan bagi peserta pendidikan dan lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha. Program magang, misalnya, merupakan salah satu contoh peranserta dunia usaha.

## Penutup

Pembangunan pendidikan merupakan upaya untuk mewujudkan terlaksananya tujuan nasional, yakni kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa. Upaya ini senantiasa menjadi pusat perhatian pemerintah dan rakyat Indonesia sebagaimana selalu dituangkan dalam program pembangunan dalam GBHN. Program pembangunan nasional yang dirumuskan dalam GBHN harus tetap dipertahankan dan diupayakan kesinambungannya sampai tercapainya tujuan nasional Indonesia.

Pembangunan pendidikan merupakan landasan terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang diperlukan demi mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu senantiasa diupayakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Apabila pembangunan nasional telah berhasil dicapai berarti bangsa Indonesia telah pula mencapai tujuan nasionalnya yakni masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, "*Garis-Garis Besar Haluan Negara*", Jakarta, 1994.
- , "*Repelita VI, Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (1994/95-1998/99), Ringkasan*", Jakarta, 1994.
- Biro Pusat Statistik, "*Statistik Indonesia 1994*", CV. Nasional, Jakarta, 1995.
- , "*Statistik Kesejahteraan Rakyat 1995*", Jakarta, 1996.
- , "*Profil Kesejahteraan Rakyat 1995*", Jakarta, 1996.
- Departemen Pendidikan Republik Indonesia, "*Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar*", Sekretariat Jenderal, Jakarta, 1990.



- , *"Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah"*, Sekretariat Jenderal, Jakarta, 1990.
- , *"Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi"*, Sekretariat Jenderal, Jakarta, 1990.
- , *"Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional"*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1992.
- , *"Empat Strategi Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional"*, Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- , *"Keputusan Mendikbud Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan"*, Jakarta, 1993.
- , *"Kurikulum 1994 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah"*, Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- , *"Link and Match"*, Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- , *"Pendidikan Dasar"*, Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- , *"Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional"*, Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- , *"Program Pendidikan Keterampilan pada SMP"*, Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- , *"Sistem Pengadaan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Guru"*, Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1993.
- , *"Perluasan Kesempatan dan Pemerataan Pendidikan"*, Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Dikbud, Jakarta, 1995.
- , *"Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Pembangunan"*, Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang Dikbud, Jakarta, 1995.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, *"Undang-Undang Dasar 1945"*, Jakarta, 1968.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional", Jakarta, 1989.
- Djojonegoro, Wardiman Dr. Ing. *"Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia"*, (Bab V: Pembangunan Pendidikan dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Depdikbud, Jakarta, 1996.
- Ministry of Education and Culture, *"The Education Development in Indonesia Towards the Take-Off Era"*, Jakarta, 1995.
- , *"Indonesia, Educational Statistics in Brief 1993/1994"*, Jakarta, 1995.
- Suryohadiprojo, Sayidiman Letjen TNI (Purn) *"Upaya Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan dan Kebudayaan"*, Seminar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 13- 14 Mei 1996, Sekretariat Jenderal Depdikbud, Jakarta, 1996.
- Tilaar, H.A.R., *"Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan"*, (Bab III: Pendidikan Nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama)", PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.